

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Instansi**

##### **1. Profil KSPPS BMT Batik Mataram**

###### **a. Profil KSPPS BMT Batik Mataram**

BMT Batik Mataram awalnya merupakan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan masih di dalam lingkungan milik Koperasi Batik Mataram. UJKS BMT Batik Mataram berawal dari pengurus Koperasi Batik Mataram yang merupakan pengusaha atau pengrajin batik ingin membuka peluang usaha dibidang ekonomi syariah. Mulai beroperasi pada tanggal 05 April 2009 BMT Mataram melaksanakan kegiatannya yang beralamatkan di Jl. Kapten Piere Tendean No. 50 A Wirobrajan Yogyakarta dengan Badan hukum No. 491/BH/12-67 tanggal 27 November 1962.

Pada tahun 2015 BMT Batik Mataram mendapat teguran dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta, bahwa tidak diperbolehkan dua lembaga dengan pola manajemen yang berbeda (konvensional dan syariah) bernaung dalam badan hukum yang sama. Adanya hal tersebut pengurus mengupayakan tetap berlangsungnya BMT Batik Mataram yang kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 telah diterbitkan Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan

pembiayaan syariah BMT Batik Mataram, dengan Akta 24 Notaris Nomor 27 tertanggal 31 Desember 2015, yang selanjutnya BMT Batik Mataram resmi berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Batik Mataram. Akta KSPPS tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengan Republik Indonesia dengan badan Hukum Nomor 002094/BH/M.KUKM.2/IX/2016.

**b. Visi dan Misi BMT Batik Mataram**

BMT Batik Mataram memiliki visi “Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah yang Sehat, Tangguh, dan Mandiri dengan Nilai-nilai Rahmatan lil’Alamin” Untuk mencapai visi tersebut BMT Batik Mataram melakukan usaha dengan melakukan beberapa misi yaitu “Memberikan Pelayanan terbaik dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan Menerapkan Nilai Syariah untuk Mewujudkan Kesejahteraan Bersama dalam Kehidupan Ummat yang Islami”.

Tabel 4.1  
Struktur Organisasi KSPPS BMT Batik Mataram

Dewan Pengawas Syariah	HM. Herman Fuadi DT, S. AG
	Anton Ismunanto
Dewan Pengawas Manajemen	H.M. Sidjri Daim
	Zurchoni Istianto
	Drs. Rohani
Pengurus :	
Ketua	Drs M Syafril N, MM
Sekretaris	Ari Yulistono
Bendahara	Muhammaf Arif Wibisono
Pengelola :	
Kepala Bagian	Budi Susetyo
Teller	Anisa Rochayati
Accounting	Nuzula Kurniati
Marketing	Sri Maryati
	Taufiqurrahman

c. Produk dan Layanan Jasa BMT Batik Mataram

1. Produk Simpanan

a. Simpanan *Wadi'ah* (penitipan murni dengan seijin penitip)

Pada simpanan ini BMT bertindak sebagai penerima dana titipan dan anggota bertindak sebagai pemilik dana titipan.

Beberapa ketentuan dari simpanan ini adalah, dana titipan dapat

diambil setiap saat; BMT tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada anggota; dan menjamin pengembalian dana titipan anggota.

b. Simpanan *Mudharabah* Umum

Pada simpanan *mudharabah* BMT bertindak sebagai pengelola dana dan anggota sebagai pemilik dana. Beberapa ketentuan dari simpanan ini adalah, dana disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal; pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah; dana dapat ditarik oleh anggota ketika penutupan rekening atau sesuai dengan kesepakatan; biaya operasional simpanan BMT sebagai *mudharib* ditutup dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya; dan BMT tidak menjamin dana anggota.

c. Simpanan *Mudharabah* berjangka

Pada prinsipnya simpanan *mudharabah* berjangka sama dengan simpanan *mudharabah*, perbedaannya adalah dana hanya dapat ditarik oleh anggota sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad. BMT Batik Mataram menyediakan 4 produk simpanan *mudharabah* berjangka yaitu, *mudharabah* berjangka dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan dengan porsi hitung bagi hasil yang telah disepakati.

2. Produk Simpanan Penyertaan

Produk Simpanan Penyertaan yang dimiliki BMT Batik Mataram adalah Produk simpanan penyertaan yang menggunakan akad *mudharabah* berjangka dan akan digunakan oleh BMT sebagai modal penyertaan. Produk simpanan penyertaan biasanya dengan jangka waktu penyimpanan yang *relative* lama, minimal 2 tahun penyimpanan.

### 3. Produk Pembiayaan

#### a. Skim Bagi Hasil

##### 1. Pembiayaan *Mudharabah* (MDA)

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan 100% modal disediakan oleh BMT. Kemudian keuntungan usaha dibagi berdasarkan proporsi nisbah yang telah disepakati. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* kecuali kerugian tersebut dikarenakan kelalaian *mudharib* seperti, penyelewengan; penyalahgunaan dana; dan kecurangan.

##### 2. Pembiayaan *Musyarakah* (MSA)

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Keuntungan dibagi secara

proporsional sesuai dengan kontribusi modal, dan kerugian ditanggung bersama secara proporsi.

b. Skim Jual Beli

- Pembiayaan *Murabahah* (MBA)

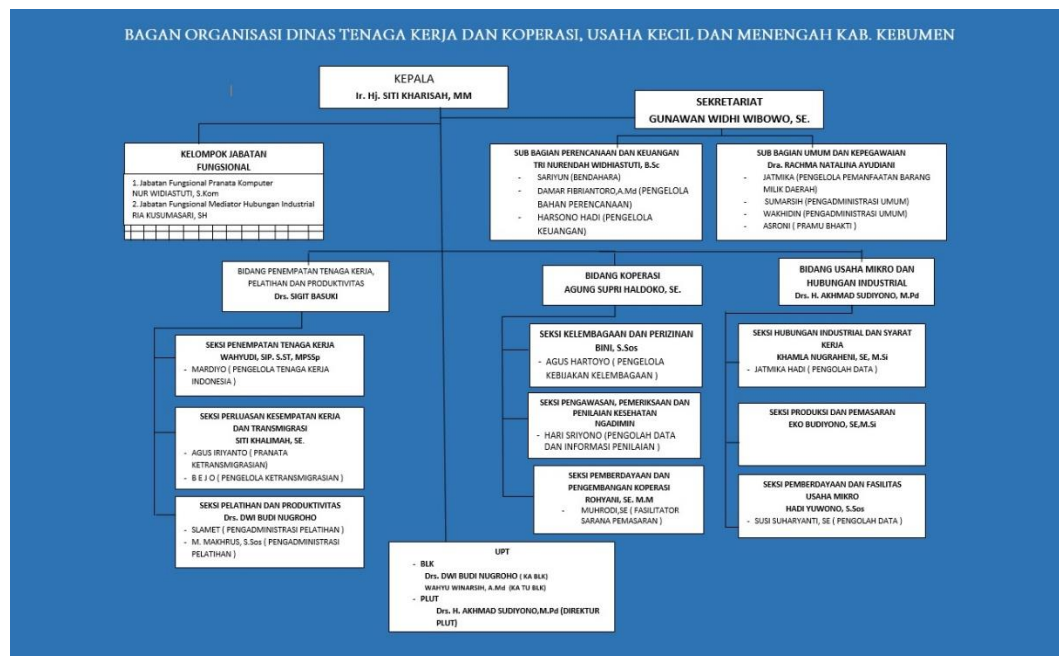
Pembiayaan dengan sistem jual beli barang pada harga asal dengan tambahan margin/keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran atau jatuh tempo (langsung).

## 2. Profil PKPRI Kabupaten Kebumen

a. Profil PKPRI Kabupaten Kebumen

PKPRI Kabupaten Kebumen melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan peraturan bupati kebumen nomor 71 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas tenaga kerja dan koperasi, usaha kecil dan menengah. PKPRI Kabupaten Kebumen pada Tanggal 7 Mei 2004 memiliki pengawasan hukum No 518.08/1288.d/BH/PAD/V/2004. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sejarah berdirinya PKPRI Kabupaten Kebumen :

1. Tahun 1988 hingga Tahun 2000, Nama Nomenklatur : Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab. Kebumen
2. Tahun 2000 hingga Tahun 2001, Nama Nomenklatur : Kantor Tenaga Kerja Kab. Kebumen
3. Tahun 2001 hingga Tahun 2004 , Nama Nomenklatur : Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kebumen
4. Tahun 2004 hingga Tahun 2016 , Nama Nomenklatur : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Kebumen
5. Tahun 2017 hingga sekarang , Nama Nomenklatur : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kebumen.



Gambar 4.1  
Struktur Organisasi PKPRI Kabupaten Kebumen

#### b. Visi dan Misi PKPRI Kabupaten Kebumen

Visi mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
2. Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur.
3. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi.
5. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi.



6. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan.
7. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Misi mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yaitu:

1. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

3. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama”.

## B. Pembahasan

### 1. Analisis Rasio Keuangan Koperasi

#### a. Aspek Permodalan

Tabel 4.2  
Rasio Modal Terhadap Asset KSPPS BMT Batik Mataram dan KPRI  
Kabupaten Kebumen

Tahun	KSPPS BMT Batik Mataram				KPRI Kabupaten Kebumen			
	Modal Sendiri (Rp)	Total Aset (Rp)	Rasio	Skor	Modal Sendiri (Rp)	Total Aset (Rp)	Rasio	Skor
2017	234.189.291	1.592.544.821	14,70	1,50	9.787.557.998	17.566.839.007	55,72	6,00
2018	251.441.286	1.673.585.285	15,02	1,50	10.819.677.653	18.260.158.777	59,25	6,00

Sumber: data diolah

Rasio modal sendiri terhadap total aset merupakan rasio yang membandingkan antara modal sendiri dengan total aset yang dimiliki. Rasio ini menggambarkan tentang kemampuan modal sendiri koperasi dalam mendukung pendanaan total aset. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa modal sendiri dan total aset KSPPS BMT Batik Mataram dan KPRI Kabupaten Kebumen keduanya mengalami kenaikan dari tahun 2017 – 2018, namun KPRI Kabupaten Kebumen memiliki nilai skor lebih tinggi dari KSPPS BMT Batik Mataram yaitu 1,50 dan 6,00. Hal ini membuktikan bahwa KPRI Kabupaten Kebumen lebih baik dalam kemampuan modal sendiri koperasi dalam mendukung pendanaan total aset dari KSPPS BMT Batik Mataram.

Tabel 4.3  
Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko KSPPS  
BMT Batik Mataram dan PKPRI Kabupaten Kebumen

Tahun	KSPPS BMT Batik Mataram				PKPRI Kabupaten Kebumen			
	Modal Sendiri (Rp)	Pinjaman diberikan yg beresiko (Rp)	Rasio	Skor	Modal Sendiri (Rp)	Pinjaman diberikan yg beresiko (Rp)	Rasio	Skor
2017	234.189.291	234.189.291	100	6,00	9.787.557.998	9787.557.998	100	6,00
2018	251.441.286	251.441.286	100	6,00	10.819.677.653	10.819.677.653	100	6,00

Sumber: data diolah

Pinjaman yang diberikan beresiko adalah dana yang dipinjamkan oleh koperasi yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan atau jaminan dari penjamin yang dapat diandalkan. Penjamin adalah anggota yang dapat diandalkan termasuk kelompok anggota yang bersedia menjamin pelunasan. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan yang beresiko merupakan rasio yang membandingkan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang beresiko. Berdasarkan Tabel 4.3 KSPPS BMT Batik Mataram dan PKPRI Kabupaten Kebumen memiliki skor tertinggi yaitu 6,00, hal ini menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki pinjaman yang beresiko dibuktikan dengan dokumentasi pendukung lainnya.

## b. Aspek Kualitas Aset Produktif

Tabel 4.4  
Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap  
Volume Pinjaman yang Diberikan KSPPS BMT Batik Mataram  
dan PKPRI Kabupaten Kebumen

Tahun	KSPPS BMT Batik Mataram				PKPRI Kabupaten Kebumen			
	Volume pinjaman pada anggota (Rp)	Volume pinjaman (Rp)	Rasio	Skor	Volume pinjaman pada anggota (Rp)	Volume pinjaman (Rp)	Rasio	Skor
2017	1.530.255.500	1.432.215.500	106,8	10,00	16.977.089.000	16.977.089.000	100	10,00
2018	1.466.913.000	1.441.265.500	101,8	10,00	14.981.965.500	14.981.965.500	100	10,00

Sumber: data diolah

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan merupakan risiko yang membandingkan antara pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan pinjaman yang telah diberikan. Berdasarkan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT Batik Mataram dan PKPRI Kabupaten Kebumen dalam menyalurkan pinjaman keseluruhannya diberikan kepada anggota, tetapi tidak menutup kemungkinan penyaluran pinjaman dapat diberikan tidak hanya kepada anggota koperasi, hal ini berdasarkan dari UU No. 25 tahun 1992 pasal 44 ayat 1, menyatakan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk : anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Tabel 4.5  
Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang  
Diberikan KSPPS BMT Batik Mataram dan PKPRI Kabupaten  
Kebumen

Tahun	KSPPS BMT Batik Mataram				PKPRI Kabupaten Kebumen			
	Pinjaman bermasalah (Rp)	Pinjaman yang diberikan (Rp)	Rasio	Skor	Pinjaman bermasalah (Rp)	Pinjaman yang diberikan (Rp)	Rasio	Skor
2017	30.121.500	1.432.215.500	2,10	4,00	250.000.000	16.977.089.000	1,47	4,00
2018	29.222.500	152.700.650	19,14	3,00	370.540.468	14.981.965.500	2,47	4,00

Sumber: data diolah

Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan merupakan risiko yang membandingkan antara pinjaman yang bermasalah kepada anggota dengan pinjaman yang telah diberikan. Berdasarkan Tabel 4.5 KSPPS BMT Batik Mataram mengalami penurunan jumlah pinjaman yang bermasalah dan jumlah pinjaman yang diberikan, sehingga skornya pun mengalami penurunan, berbeda pada tabel 4.8, PKPRI Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan jumlah pinjaman yang bermasalah, namun jumlah pinjaman yang diberikan mengalami penurunan, tetapi hal ini tidak mempengaruhi skor yang didapat, PKPRI Kabupaten Kebumen tetap konsisten dengan perolehan skor 4,00.

Tabel 4.6  
Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah KSPPS  
BMT Batik Mataram dan PKPRI Kabupaten Kebumen

Tahun	KSPPS BMT Batik Mataram				PKPRI Kabupaten Kebumen			
	Cadangan risiko (Rp)	Pinjaman bermasalah (Rp)	Rasio	Skor	Cadangan risiko (Rp)	Pinjaman bermasalah (Rp)	Rasio	Skor
2017	3.659.215	30.121.500	12,1	1,00	914.173.953	250.000.000	365,6	5,00
2018	8.091.963	29.222.500	27,7	1,50	1.040.796.453	370.540.468	280,8	5,00

Sumber: data diolah

Risiko pinjaman bermasalah adalah hasil penjumlahan dari 50% pinjaman kurang lancar (PKL), 75% pinjaman diragukan (PDR), 100% pinjaman macet (PM). Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah merupakan perbandingan antara cadangan risiko dibagi dengan total pinjaman bermasalah. Berdasarkan Tabel 4.6 KSPPS BMT Batik Mataram mengalami kenaikan skor pada tahun 2017 yaitu 1,00 menjadi 1,50 pada tahun 2018, sedangkan PKPRI Kabupaten Kebumen tetap konsisten dengan skor 5,00 yang merupakan skor tertinggi dalam rasio ini, hal ini menunjukkan skor yang diperoleh PKPRI Kabupaten Kebumen lebih tinggi daripada KSPPS BMT Batik Mataram.

Tabel 4.7  
Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang  
Diberikan KSPPS BMT Batik Mataram dan PKPRI Kabupaten  
Kebumen

Tahun	KSPPS BMT Batik Mataram				PKPRI Kabupaten Kebumen			
	Pinjaman yang berisiko (Rp)	Pinjaman yang diberikan (Rp)	Rasio	Skor	Pinjaman yang berisiko (Rp)	Pinjaman yang diberikan (Rp)	Rasio	Skor
2017	0	1.432.215.500	0	5,00	0	16.977.089.000	100	5,00
2018	0	1.152.700.650	0	5,00	0	14.981.965.500	100	5,00

Sumber: data diolah

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman berisiko dibagi dengan total pinjaman diberikan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar pinjaman yang berisiko dari keseluruhan pinjaman yang diberikan. Berdasarkan Tabel 4.7 KSPPS BMT Batik Mataram dan PKPRI Kabupaten Kebumen tidak memiliki pinjaman yang berisiko, hal ini dibuktikan dengan dokumentasi pendukung yang dilakukan peneliti, sehingga KSPPS BMT Batik Mataram dan PKPRI Kabupaten Kebumen memiliki skor tertinggi yaitu 5,00.



## c. Aspek Manajemen

Tabel 4.8  
Perbandingan Kinerja Manajemen Koperasi

No	Aspek Yang Dinilai	Skor			
		KSPPS BMT Batik Mataram		PKPRI Kabupaten Kebumen	
		2017	2018	2017	2018
1.	Manajemen Umum	2,00	2,75	2,75	2,75
2.	Manajemen Kelembagaan	2,00	3,00	2,50	2,50
3.	Manajemen Permodalan	1,8	1,8	2,40	2,40
4.	Manajemen Aset	2,1	2,7	3,00	3,00
5.	Manajemen Likuiditas	3,00	3,00	3,00	3,00
Total		10,9	13,25	13,65	13,65

Sumber: data diolah

Tabel 4.8 Menunjukkan KSPPS BMT Batik Mataram mengalami peningkatan skor dari 10,9 menjadi 13,25. PKPRI Kabupaten Kebumen tetap konsisten pada perolehan skor 13,65. Rincian keseluruhan skor tersebut terlampir, Tabel 4.8 menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen koperasi sangat baik dilihat dari peningkatan dan konsistensi perolehan skor. Hal ini membuktikan bahwa Koperasi dan BMT memiliki komitmen untuk menjaga kualitas kinerjanya dengan menerapkan prinsip - prinsip operasional koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri dan UKM sehingga mendapatkan predikat sehat.

## d. Aspek Efisiensi

Tabel 4.9  
Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto  
KSPPS BMT Batik Mataram dan KPRI Kabupaten Kebumen

Tahun	KSPPS BMT Batik Mataram				KPRI Kabupaten Kebumen			
	Beban operasi anggota (Rp)	Partisipasi bruto (Rp)	Rasio	Skor	Beban operasi anggota (Rp)	Partisipasi bruto (Rp)	Rasio	Skor
2017	125.349.699	212.237.900	59	4,00	2.365.353.967	2.586.821.746	91,4	3,00
2018	107.151.700	212.245.650	50,5	4,00	2.543.652.934	2.770.365.269	91,8	3,00

Sumber: data diolah

Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional anggota dibagi dengan partisipasi bruto. Sesuai dengan pedoman penilaian kinerja koperasi yang baik adalah skor dari rasio ini tidak lebih dari 90%, dari Tabel 4.9 KSPPS BMT Batik Mataram mendapat skor tertinggi yaitu 4,00 sedangkan KPRI Kabupaten Kebumen mendapat skor 3,00. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT Batik Mataram dapat dikatakan lebih sehat daripada KPRI Kabupaten Kebumen.

Tabel 4.10  
Rasio Beban Usaha Terhadap SHU kotor KSPPS BMT Batik  
Mataram dan KPRI Kabupaten Kebumen

Tahun	KSPPS BMT Batik Mataram				KPRI Kabupaten Kebumen			
	Beban Usaha (Rp)	SHU Kotor (Rp)	Rasio	Skor	Beban Usaha (Rp)	SHU Kotor (Rp)	Rasio	Skor
2017	125.349.699	26.743.585	468,7	1,00	2.392.447.746	422.075.000	566,8	1,00
2018	122.579.386	28.931.231	423,6	1,00	2.543.652.934	423.030.156	601,3	1,00

Sumber: data diolah

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor merupakan perbandingan antara jumlah beban usaha dibagi dengan sisa hasil usaha (SHU) kotor. Berdasarkan Tabel 4.10 KSPPS BMT Batik Mataram dan PKPRI Kabupaten Kebumen memiliki skor yang sama yaitu 1,00. Skor yang diperoleh keduanya merupakan skor terendah dalam rasio ini karna lebih dari 80% , sedangkan rasio tertinggi yang harus diperoleh dalam rasio ini adalah kurang dari 40% dengan perolehan skor 4,00.

Tabel 4.11  
Rasio Efisiensi Pelayanan KSPPS BMT Batik Mataram dan  
PKPRI Kabupaten Kebumen

Tahun	KSPPS BMT Batik Mataram				PKPRI Kabupaten Kebumen			
	Biaya Karyawan (Rp)	Volume Pinjaman (Rp)	Rasio	Skor	Biaya Karyawan (Rp)	Volume Pinjaman (Rp)	Rasio	Skor
2017	86.247.400	1.432.215.500	6,02	1,50	85.000.000	16.977.089.000	0,50	2,00
2018	98.663.800	441.265.500	6,84	1,50	213.851.500	14.981.965.500	1,43	2,00

Sumber: data diolah

Rasio efisiensi pelayanan merupakan perbandingan antara jumlah gaji dan honorarium karyawan koperasi dibagi dengan volume pinjaman yang diberikan oleh koperasi. Pedoman penilaian menjelaskan bahwa skor tertinggi adalah 2.00 apabila nilai rasio kurang dari 5%. Berdasarkan Tabel 4.11 KSPPS BMT Batik Mataram memiliki skor lebih rendah dibanding PKPRI Kabupaten Kebumen, hal ini dibuktikan dengan rasio yang diperoleh KSPPS BMT Batik Mataram lebih dari 5%. Sehingga PKPRI Kabupaten Kebumen dapat dikatakan lebih sehat daripada KSPPS BMT Batik Mataram.

## e. Aspek Likuiditas

Tabel 4.12  
Rasio kas KSPPS BMT Batik Mataram dan PKPRI Kabupaten  
Kebumen

Tahun	KSPPS BMT Batik Mataram				PKPRI Kabupaten Kebumen			
	Kas + Bank (Rp)	Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio	Skor	Kas + Bank (Rp)	Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio	Skor
2017	509.586.600	867.103.009	58,78	2,50	1.702.973.268	5.117.826.699	33,28	2,50
2018	529.999.700	912.906.905	58,05	2,50	1.851.593.239	4.475.820.094	37,9	2,50

Sumber: data diolah

Rasio kas merupakan perbandingan antara kas ditambah dengan tabungan dan deposito di bank dibagi dengan kewajiban lancar. Berdasarkan Tabel 4.12 KSPPS BMT Batik Mataram dan PKPRI Kabupaten Kebumen memiliki skor 2,50 dimana rasio keduanya adalah lebih dari 20%. Menurut pedoman penilaian skor tertinggi adalah 10.00 apabila nilai rasio kurang dari 10% tetapi tidak melebihi 15%.

Tabel 4.13  
Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima  
KSPPS BMT Batik Mataram dan PKPRI Kabupaten Kebumen

Tahun	KSPPS BMT Batik Mataram				PKPRI Kabupaten Kebumen			
	Pinjaman yang diberikan (Rp)	Dana yang diterima (Rp)	Rasio	Skor	Pinjaman yang diberikan (Rp)	Dana yang diterima (Rp)	Rasio	Skor
2017	1.432.215.500	867.103.009	91,5	5,00	16.977.089.000	3.506.472.761	484,1	5,00
2018	1.152.700.650	1.673.585.285	68,8	2,50	14.981.965.500	3.786.272.289	395,6	5,00

Sumber: data diolah

Dana yang diterima adalah total kewajiban dikurangi dengan SHU. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima merupakan perbandingan antara total volume pinjaman yang diberikan dibagi dengan dana yang diterima. Berdasarkan Tabel 4.13 KSPPS BMT Batik Mataram mengalami penurunan jumlah pinjaman yang diberikan pada tahun 2017 ke tahun 2018, meskipun jumlah dana yang diterima mengalami kenaikan, namun tidak berpengaruh terhadap skor yang diperoleh tetap mengalami penurunan. PKPRI Kabupaten Kebumen tidak mengalami penurunan, tetap konsisten dengan skor tertinggi, dengan rasio lebih dari 90% sehingga mendapatkan skor 5,00 meskipun jumlah pinjaman yang diberikan mengalami penurunan.

f. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Tabel 4.14  
Rasio Rentabilitas Aset KSPPS BMT Batik Mataram dan PKPRI Kabupaten Kebumen

Tahun	KSPPS BMT Batik Mataram				PKPRI Kabupaten Kebumen			
	SHU Sebelum Pajak (Rp)	Total Aset (Rp)	Rasio	Skor	SHU Sebelum Pajak (Rp)	Total Aset (Rp)	Rasio	Skor
2017	26.743.585	1.592.544.821	1,70	0,75	422.075.000	17.566.839.007	2,40	0,75
2018	28.931.231	1.673.585.285	1,73	0,75	423.030.156	18.260.158.777	0,00	0,75

Sumber: data diolah

Rasio Rentabilitas Aset adalah rasio perbandingan antara sisa hasil usaha sebelum pajak dibagi dengan total aset. Berdasarkan Tabel 4.14 KSPPS BMT Batik Mataram dan PKPRI Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan dari jumlah SHU sebelum pajak dan total aset. 0,75

adalah skor yang didapat apabila rasio kurang dari sama dengan 5%, sedangkan skor tertinggi adalah 3,00 dimana rasio yang diperoleh harus lebih dari 10%.

Tabel 4.15  
Rasio Rentabilitas Modal Sendiri KSPPS BMT Batik Mataram  
dan PKPRI Kabupaten Kebumen

Tahun	KSPPS BMT Batik Mataram				PKPRI Kabupaten Kebumen			
	SHU bagian anggota (Rp)	Total modal sendiri (Rp)	Rasio	Skor	SHU bagian anggota (Rp)	Total modal sendiri (Rp)	Rasio	Skor
2017	9.126.249	234.189.291	3,10	1,50	211.037.500	9.787.557.998	2,16	0,75
2018	9.872.783	251.441.286	3,93	1,50	211.515.078	18.260.158.777	1.15	0,75

Sumber: data diolah

Rasio Rentabilitas Modal Sendiri merupakan perbandingan antara sisa hasil usaha dibagi dengan modal sendiri. Semakin tinggi nilai rasio yang diperoleh berarti semakin baik pula kinerja koperasi. SHU bagian anggota didapat dari perhitungan SHU yang dihasilkan, sehingga besarnya SHU bagian anggota tergantung kepada jumlah SHU yang mampu dihasilkan oleh koperasi. Berdasarkan Tabel 4.15 KSPPS BMT Batik Mataram memiliki skor lebih tinggi daripada PKPRI Kabupaten Kebumen.

Tabel 4.16  
Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan KSPPS BMT Batik  
Mataram dan KPRI Kabupaten Kebumen

Tahun	KSPPS BMT Batik Mataram				KPRI Kabupaten Kebumen			
	Partisipasi Neto (Rp)	Beban usaha + beban perkoperasian (Rp)	Rasio	Skor	Partisipasi Neto (Rp)	Beban usaha + beban perkoperasian (Rp)	Rasio	Skor
2017	212.237.900	125.349.699	169,31	4,00	2.586.821.746	2.392.447.746	108,1	4,00
2018	212.245.650	122.579.386	173,15	4,00	2.770.365.269	2.543.652.934	108,9	4,00

Sumber: data diolah

Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan adalah perbandingan antara partisipasi netto dibagi dengan beban usaha ditambah dengan beban perkoperasian. Berdasarkan pedoman penilaian skor KSPPS BMT Batik Mataram dan KPRI Kabupaten Kebumen yang didapat adalah 4.00 karena rasio yang dihasilkan melebihi 100%, sedangkan apabila memperoleh nilai rasio kurang dari 100% akan memperoleh skor 0,00. Berdasarkan Tabel 4.16 menunjukkan bahwa KSPPS BMT Batik Mataram dan KPRI Kabupaten Kebumen yang berarti kemandirian koperasi dalam pelayanan operasional untuk anggota mampu dilakukan secara maksimal.

## g. Aspek Jatidiri Koperasi

Tabel 4.17  
Rasio Partisipasi Bruto KSPPS BMT Batik Mataram dan PKPRI  
Kabupaten Kebumen

Tahun	KSPPS BMT Batik Mataram				PKPRI Kabupaten Kebumen			
	Partisipasi Bruto (Rp)	Partisipasi bruto + Pendapatan (Rp)	Rasio	Skor	Partisipasi Bruto (Rp)	Partisipasi bruto + Pendapatan (Rp)	Rasio	Skor
2017	212.237.900	212.237.900	100	7,00	2.586.821.746	4.081.320.601	63,38	7,00
2018	212.245.650	212.245.650	100	7,00	2.770.365.269	6.760.863.030	40,8	3,50

Sumber: data diolah

Rasio partisipasi bruto merupakan perbandingan antara partisipasi bruto dibagi dengan pendapatan operasional. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota. Berdasarkan Tabel 4.17 KSPPS BMT Batik Mataram memperoleh nilai rasio sebesar 100% pada tahun 2017 dan 2018. Hal ini dikarenakan BMT tidak memiliki pendapatan lain selain dari anggota itu sendiri. Berdasarkan pedoman penilaian skor yang didapat adalah 7.00 karena rasio yang dihasilkan melebihi 75%. PKPRI Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dikarenakan skor yang diperoleh tahun 2018 lebih rendah dari skor perolehan tahun 2017.



Tabel 4.18  
Rasio Promosi Ekonomi Anggota KSPPS BMT Batik Mataram  
Mataram dan PKPRI Kabupaten Kebumen

Tahun	KSPPS BMT Batik Mataram				PKPRI Kabupaten Kebumen			
	PEA (Rp)	Simpanan pokok + simpanan wajib (Rp)	Rasio	Skor	PEA (Rp)	Simpanan pokok + simpanan wajib (Rp)	Rasio	Skor
2017	9.126.249	27.012.000	33,8	3,00	211.037.500	8.451.309.045	2,50	0,00
2018	11.627.800	28.964.000	40,15	3,00	211.215.078	9.365.255.085	2,26	0,00

Sumber: data diolah

Promosi Ekonomi Anggota (PEA) adalah MEPPP ditambah manfaat SHU. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Tabel 4.18 menunjukkan bahwa KSPPS BMT Batik Mataram memiliki skor 3,00 dengan perolehan rasio lebih dari 10% yang berarti lebih tinggi daripada PKPRI Kabupaten Kebumen yang memiliki skor 0,00 karna rasio yang dihasilkan kurang dari 5%.

Tabel 4.19  
Rekapitulasi Hasil Penilaian Kesehatan KSPPS BMT Batik Mataram dan  
PKPRI Kabupaten Kebumen

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		KSPPS BMT Batik Mataram		PKPRI Kabupaten Kebumen	
		2017	2018	2017	2018
1.	Permodalan a. Rasio modal sendiri terhadap asset b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan	1,50 6,00	1,50 6,00	6,00 6,00	6,00 6,00
2.	Kualitas Aset Produktif a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman diberikan b. Rasio Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan.	10,00 4,00 1,00 5,00	10,00 3,00 1,50 5,00	10,00 4,00 5,00 5,00	10,00 4,00 5,00 5,00
3.	Manajemen a. Manajemen Umum b. Kelembagaan c. Permodalan d. Aset e. Likuiditas	2,00 2,00 1,80 2,10 3,00	2,75 3,00 1,80 2,70 3,00	2,75 2,50 2,40 3,00 3,00	2,75 2,50 2,40 3,00 3,00
4.	Likuiditas a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima	2,50 5,00	2,50 2,50	2,50 5,00	2,50 5,00

No	Aspek yang Dinilai	Skor			
		KSPPS BMT Batik Mataram		PKPRI Kabupaten Kebumen	
		2017	2018	2017	2018
5.	Efisiensi a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto b. Rasio Beban Usahat terhadap SHU Kotor c. Rasio Efisiensi Pelayanan	4,00 1,00 1,50	4,00 1,00 1,50	3,00 1,00 2,00	3,00 1,00 2,00
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan a. Rasio Rentabilitas Asset b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan	0,75 1,50 4,00	0,75 1,50 4,00	0,75 0,75 4,00	0,75 0,75 4,00
7.	Jatidiri Koperasi a. Rasio Partisipasi Bruto b. Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA)	7,00 3,00	7,00 3,00	7,00 0,00	3,50 0,00
Total		68,65	68	75,65	72,15

Sumber: data diolah

Tabel 4.19 Diketahui hasil perhitungan penilaian kesehatan KSPPS BMT Batik Mataram dan PKPRI Kabupaten Kebumen tahun 2017-2018, Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 mengalami penurunan. KSPPS BMT Batik Mataram mengalami penurunan sebesar 0,65 yang sebelumnya pada tahun 2017 memiliki total skor 68,65 menjadi 68 pada tahun 2018. PKPRI Kabupaten Kebumen mengalami penurunan sebesar 3,50 dengan total skor 75,65 pada tahun 2017 menjadi 72,15 pada

tahun 2018, meskipun tingkat kesehatan KSPPS BMT Batik Mataram dan PKPRI Kabupaten Kebumen menurun, namun keduanya mendapatkan kategori cukup sehat untuk tahun 2017-2018 dengan total skor berada dalam rentang 60 sampai dengan 80.

Berdasarkan analisis data tersebut, dapat diketahui kekuatan dan kelemahan koperasi, dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan tersebut, manajemen koperasi dapat mengetahui kinerja koperasi sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan koperasi yang sehat, selain itu manajemen koperasi dapat membuat tindakan pencegahan agar tidak merugikan anggota. Tindakan yang dapat diambil oleh manajemen koperasi adalah dengan meningkatkan SDM anggota. Peningkatan kualitas SDM anggota diharapkan dapat memberikan timbal balik yang positif kepada koperasi.

Kekuatan koperasi adalah dari aspek jatidiri dan manajemen. Jatidiri koperasi menggambarkan kemampuan koperasi dalam mempromosikan perekonomian anggotanya, sedangkan manajemen menjelaskan tentang prosedur koperasi dalam menjalankan kegiatan koperasinya, dengan mengetahui kekuatan tersebut, manajemen koperasi dapat menggunakannya sebagai media untuk mempromosikan jasanya kepada masyarakat. Manajemen koperasi dituntut secara efisien dan efektif mampu menjalankan tata kelola perkoperasian yang baik berdasarkan prinsip koperasi. Prinsip koperasi merupakan dasar bagi koperasi sebagai badan usaha yang membedakannya dengan badan usaha lainnya.